

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Agustinus Sihombing, *et. al.*, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2023)

Benhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012)

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013)

E. Fernando M Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023)

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)

Gunanegara, *Hak Negara dan Warga Negara atas Tanah*, (Google Play Books, 2020)

_____, *Hukum Pidana Agraria: Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Tatanusa, 2017)

_____, *Mafia Tanah dan Primum Remidium*, (Jakarta: Ebook, 2022)

_____, *Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law*, (Jakarta: Tatanusa, 2018)

H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002)

H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 2002)

Mardianis, *Hukum Antariksa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara : Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria*, (Jakarta: UB Press, 2011)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016)

Philipus M. Hadjon, *et. al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1999)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administtasi Negara*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara : Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)

Romi Sihombing, *Cacat Administrasi: Pembatalan Sertifikat tanah oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2022)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Sri Hajati, *et.al*, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017)

Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Urip Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012)

_____, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2019)

_____, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Jurnal Nasional:

Andi Batari Anindhita, *et.al*, “Perbandingan Sistem Publikasi Positif dan Negatif Pendaftaran Tanah : Perspektif Kepastian Hukum”, *Amanna Gappa*, Vol. 29, No. 2 2021.
DOI: 10.20956/ag.v29i2.19679.

Anggiat Perdamean Parsaulian dan Sudjito, “Masalah Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kota Banjarbaru (Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM)”, *Jurnal Agraria dan Pertanahan BHUMI*, Vol. 5, No. 1 Mei 2019.
DOI: 10.31292/jb.v5i1.324.

Astrid Unggul Pawestri, “Analisis Yuridis Tumpang Tindih Hpl Pelindo II Yang Terbit Di Atas HGB PT Rai (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 92PK/PDT/2020)”, *Notary Jurnal*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2021.
DOI : 10.19166/nj.v1i2.4178.

Gunanegara, “Kebijakan Negara Pada Pengaturan Hak Atas Tanah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, *Refleksi Hukum*, Vol. 6, No. 2 April 2022.
DOI: 10.24246/jrh.2022.v6.i2.p161-184.

_____, “Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebagai Alas Hak Pengurusan Hak Atas Tanah”, *Law Review*, Vol. 21, No. 3 Maret 2022.
DOI: 10.19166/lr.v0i3.4864.

Ni Made Silvia Gayatri. *Et.al.*, “Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1 2021.
DOI: 10.22225/ah.3.1.2924.79-83.

Novia Tika Febriana dan Murry Darmoko A., *Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181/B/2020/Pt.Tun.Sby)*, *Jurnal Judiciary*, Vol. 11, No. 1 2022.

Monalisa Ulfah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Akibat Terjadinya Sertipikat Ganda”, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 6 No. 2, 2017
DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.13281.

Natasha Camilla Hufadzah, *et al*, “Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Terhadap Sertipikat Ganda (Studi Putusan Nomor: 062/G/2014/PTUN.SMG)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6 No. 2 2017.
DOI: 10.14710/dlj.2017.19541

Putusan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 72/G/2017/PTUN-BDG tertanggal 12 Oktober 2017

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 1/B/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 5 Februari 2018

Putusan Nomor: 346 K/TUN/2018 tertanggal 17 Juli 2018

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Ely Baharini, Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat, Zoom Meeting, Tanggal 12 November 2023, Pukul 19.00 wib.

Website/Internet:

Jeka Kampai, "Akhirnya, Tanah Ulayat di Sumatra Barat Bisa Bersertifikat".
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6975800/akhirnya-tanah-ulayat-di-sumatra-barat-bisa-bersertifikat>, diakses pada 19 Oktober 2023.